

**Judul** : Hadiri RDP Komisi VIII bersama DEN, Kemensos demonstrasikan digitalisasi bansos di DPR  
**Tanggal** : Kamis, 11 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Hadiri RDP Komisi VIII Bersama DEN Kemensos Demonstrasikan Digitalisasi Bansos Di DPR

KEMENTERIAN Sosial bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendemonstrasikan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Demonstrasi itu menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan transformasi digital perlindungan sosial, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan dari DPR.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipu) turun langsung dalam rapat tersebut. Dia didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, jajaran Kementerian Sosial (Kemensos), serta perwakilan DEN.

Dalam paparannya, Gus Ipu menegaskan, digitalisasi bansos merupakan bagian dari reformasi menyeluruh tata kelola perlindungan sosial yang berbasis data, transparan, dan akuntabel. Dia menegaskan, langkah itu selaras dengan arahan Presiden untuk mewujudkan satu data nasional sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

"Melalui sistem ini, setiap pengajuan bansos dapat langsung diketahui hasilnya, termasuk alasan diterima atau ditolak.

Ini penting untuk menghindari perdebatan di lapangan dan meningkatkan kepercayaan publik," ujar Gus Ipu.

Sebagai bagian dari demonstrasi, sistem diuji coba secara langsung dengan melibatkan anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya. Dalam simulasi itu, Atalia melakukan pendaftaran bantuan sosial dengan mengakses laman [perlitasos.kemensos.go.id](http://perlitasos.kemensos.go.id), menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik melalui pemindai wajah (liveness detection).

Sementara itu, perwakilan DEN, Rahmat Danu Andika yang memandu simulasi menjelaskan, sistem dirancang untuk memastikan validitas identitas sekaligus akurasi data secara real time.

"Barusan yang terjadi adalah satu, dicek bahwa yang bersangkutan betul manusia di depan handphone, dan yang kedua dicek ke Dukcapil sebagai source of truth biometrik populasi Indonesia. Tanpa meng-input nama, data langsung muncul secara *real-time* sebagai balikan dari Dukcapil," jelasnya.

Rahmat menambahkan, setelah proses autentikasi biometrik, sistem langsung melakukan verifikasi lintas basis data secara terintegrasi. "Begitu pengajuan dilakukan, sistem secara instan

akan bertanya ke berbagai sumber data mulai dari kepemilikan kendaraan, status pekerjaan dan upah, konsumsi listrik, hingga kepemilikan aset tanah semuanya database to database secara *real time*," tambahnya.

Secara teknis, lanjut dia, sistem bekerja dengan pendekatan data exchange platform yang menghubungkan berbagai basis data nasional.

Selain itu, sistem juga terintegrasi dengan data desil kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar utama penentuan kelayakan penerima.

"Seluruh proses tersebut berlangsung dalam hitungan detik dan menghasilkan keputusan yang disertai alasan yang terukur dan dapat ditelusuri," imbuhnya.

Dalam simulasi tersebut, pengajuan yang dilakukan menunjukkan hasil tidak layak menerima bantuan. Sistem secara transparan menampilkan faktor-faktor penentu, seperti kepemilikan aset, tingkat konsumsi listrik, hingga posisi dalam desil kesejahteraan. Pendekatan ini memberikan kepastian baik bagi masyarakat maupun pelaksana di lapangan.

Dari sisi pengawasan, DPR menilai transparansi data dan keterbukaan alasan keputusan menjadi langkah maju dalam memastikan akuntabilitas program

bansos. Sistem ini dinilai dapat mendukung fungsi pengawasan dan penganggaran DPR, karena seluruh proses berbasis pada data yang terintegrasi dan terstandar.

Melanjutkan keterangannya, Rahmat mengatakan, Kemensos juga menyiapkan mekanisme sangaah bagi masyarakat yang merasa datanya belum sesuai. Melalui fitur itu, pembaruan data dapat diajukan secara langsung dan terhubung dengan sistem nasional, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara cepat sebelum penetapan penerima manfaat.

"Penggunaan autentikasi biometrik dalam sistem ini menjadi salah satu inovasi utama untuk mencegah penyalahgunaan data, termasuk praktik peminjaman identitas. Teknologi liveness detection memastikan bahwa pengajuan dilakukan oleh individu yang benar-benar hadir, bukan melalui manipulasi foto, video, maupun rekayasa digital," tuturnya.

Sebagai informasi, Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemensos, Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, LKPP, hingga BSSN terlibat dalam komite ini, untuk mewujudkan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan data lintas instansi Pemerintah dalam satu sistem terpadu. ■ TIF